



2017

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Email satpolppkabkh@gmail.com



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

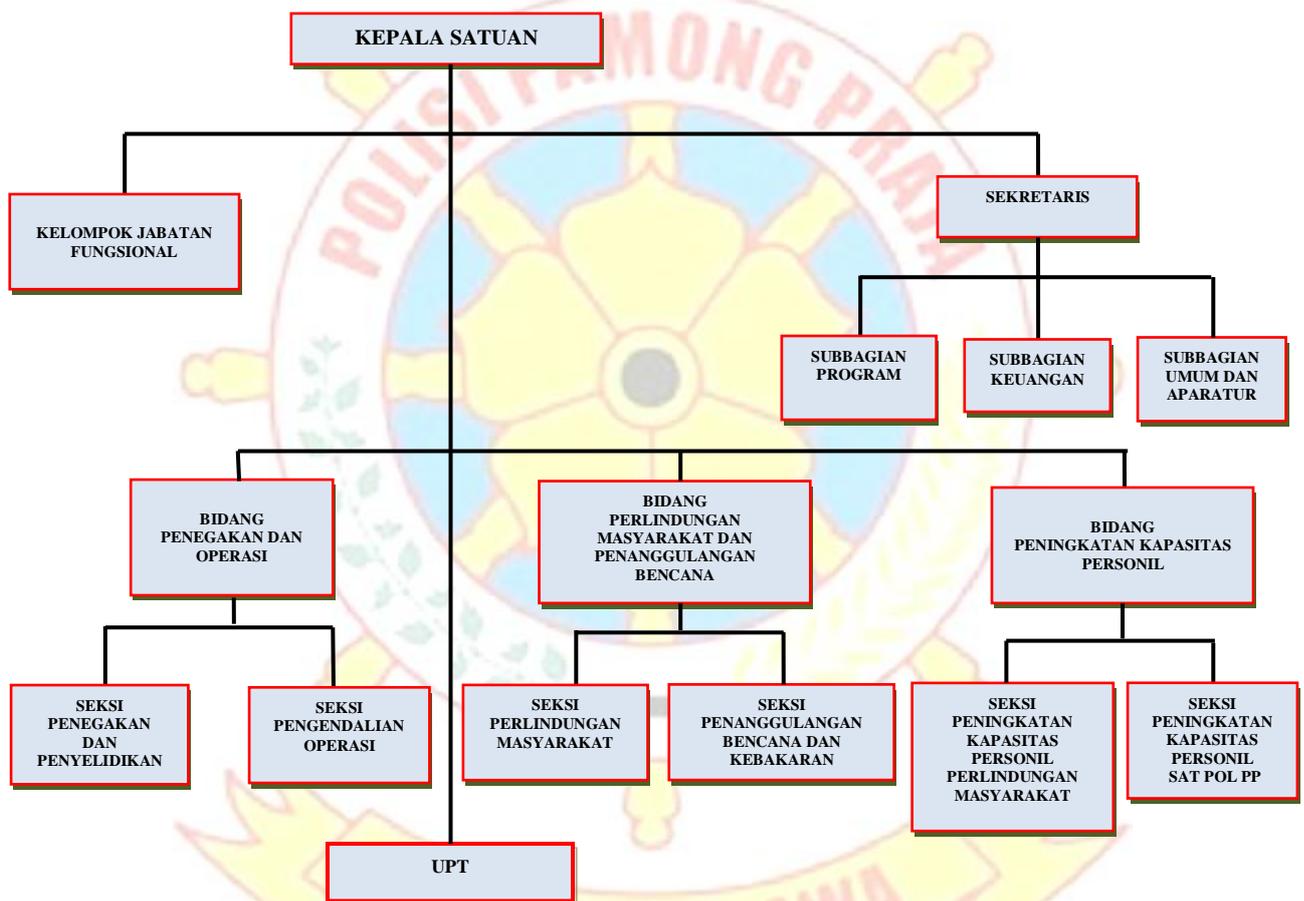
- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;



- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada gambar berikut

**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
(Perbub Nomor 65 Tahun 2016)**



Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :



1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:



- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;



- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



7. Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;



- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara periodik;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan Masyarakat;
- 4) Pemberdayaan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

a. Tugas

Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana dan kabakaran;
- 3) Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
- 4) Fasilitasi penanganan darurat bencana;



- 5) Fasilitasi penanganan kebakaran;
- 6) Fasilitasi penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana dan Kebakaran; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.



b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

a. Tugas

Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peningkatan kapasitas personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional satuan polisi pamong praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukan;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang data dan informasi kependudukan secara periodik;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peningkatan Kapasitas Personil secara Periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh 70 orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Esselon, Pendidikan, Golongan Ruang dan telah mengikuti DIKLATPIM

NO	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG				DIKLATPIM	
		S2	S1/ D4	D3	SLTA	SD/ SLTP	I	II	III	IV	SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	III	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-
3	IV	3	1	-	6	-	-	-	9	1	9	1
	SUB JUMLAH	5	2	0	6	0	0	0	9	4	12	1
4	FUNGSIONAL	1	4	1	49	2		44	13	-	-	57
	TOTAL	6	6	1	55	2	0	44	22	4	12	58

D. SARANA DAN PRASARANA

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang mendukung Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu Tahun 2017

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil Patroli dalam Kota	1 Unit	1	-	-	
2	Mobil PATWAL	2 Unit	2	-	-	
3	Mobil DAMKAR	3 Unit	3	-	-	
4	Mobil Rescue	1 Unit	1	-	-	
5	Mobil Dapur Umum	1 Unit	1	-	-	
6	Motor Pengawalan	2 Unit	2	-	-	
7	Speed Long Boat	1 Unit	1	-	-	



8	Tameng Anti Huru Hara	15 Unit	13	-	2	
9	Tongkat T	60 Unit	20	-	40	
10	Helm Anti Huru Hara	15 Unit	15	-	-	
12	Baju Anti Huru Hara	15 Stel	15	-	-	
13	Baju Tahan Panas	15 Stel	15	-	-	
14	Helm Tahan Panas	15 Stel	14	-	1	
15	Sepatu Tahan Panas	15 Psg	15	-	-	
16	Sarung Tangan Tahan Panas	15 Psg	15	-	-	
17	Kaca Mata Tahan Panas	15 Buah	15	-	-	
18	Masker	15 Buah	15	-	-	
19	Oksigen Portable	2 Set	2	-	-	
20	HT	15 Buah	15	-	-	
21	Selang Penyemprot Air	20 Gulung	20	-	-	
22	Nozzle	8 BH	□□	-	-	
23	Mesin Penyedot Air Portable	2	2	-	-	
24	Pipa Penyedot	5 Buah	5	-	-	

E. SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 ini disusun dengan penyajian dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Sistematika Laporan.

BAB II : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Program dan Kegiatan

BAB III : PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

BAB IV : PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

DOKUMEN PENDUKUNG



BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Misi

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KONDISIF MELALUI PENEGAKKAN PERDA, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT”

2. Pernyataan Misi

Untuk melaksanakan Visi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- c. Meningkatkan Pengendalian Operasional Melalui Penertiban, Penindakan Pelanggaran serta Pembinaan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Menyelenggarakan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Secara Profesional dan Terkoordinasi.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengukur sejauh mana visi dan misi Satuan telah dicapai. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas;
- b. Mantabnya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang kondusif;
- c. Terciptanya suasana yang tenteram, tertib dan aman; dan
- d. Meningkatkan pencegahan dini dan penanggungan bencana alam.



2. Sasaran

Untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi;
- b. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama;
- c. Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat; dan
- d. Terwujudnya Pencegahan dini, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan 2017

a. Sekretariat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas / Operasional
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
		Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum



		Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya
		Penyediaan Jasa Publikasi
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

b. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal

c. Bidang Penegakan dan Operasi

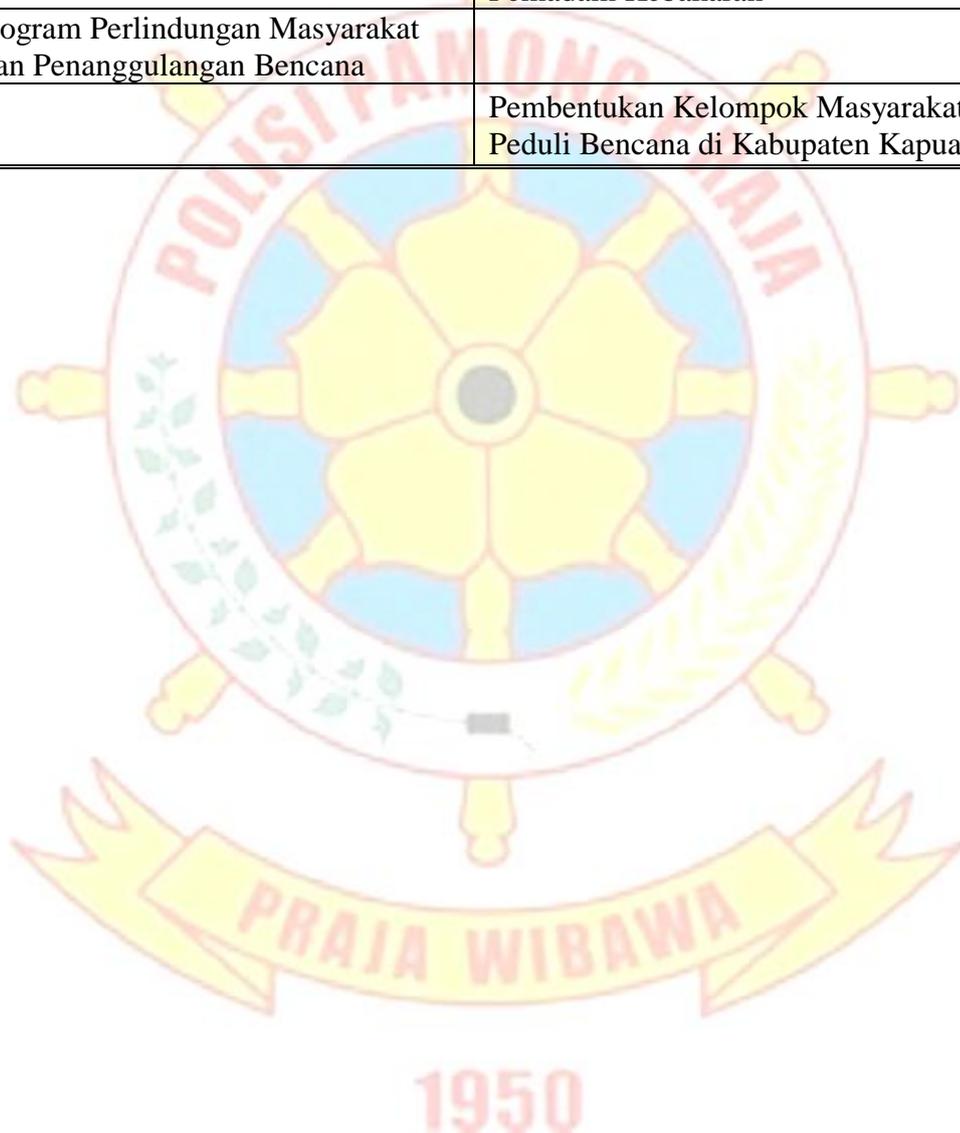
NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	
		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan
2	Pogram Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	
		Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
		Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda

d. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	
		Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
2	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	
		Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
		Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran
		Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran



		Hutan dan Lahan
		Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana
		Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor
3	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
9	Program Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana	
		Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu





BAB III PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

Pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh bupati Kapuas Hulu, dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017. Adapun alokasi dan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.475.000,00	5.475.000,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.460.000,00	33.237.330,00	93,73
		Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18.725.000,00	17.160.450,00	91,64
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	81.880.000,00	80.520.000,00	98,34
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.728.000,00	76.728.000,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.508.000,00	22.508.000,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12.000.000,00	11.760.000,00	98,00
		Penyediaan Makanan dan Minuman	150.150.000,00	150.150.000,00	100,00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	436.349.000,00	436.348.719,00	100,00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	503.490.000,00	503.412.000,00	99,98
		Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	200.228.000,00	200.093.509,00	99,93



1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya	2.649.800.000,00	2.600.170.000,00	98,13
		Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000,00	5.403.000,00	72,04
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	315.750.000,00	305.652.250,00	96,80

b. Bidang Penegakan dan Operasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.040.000,00	48.060.000,00	133,35
		Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan	28.444.000,00	276.065.000,00	970,56
2	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	166.900.000,00	166.900.000,00	100,00
		Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda	93.504.000,00	21.000.000,00	22,46

c. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

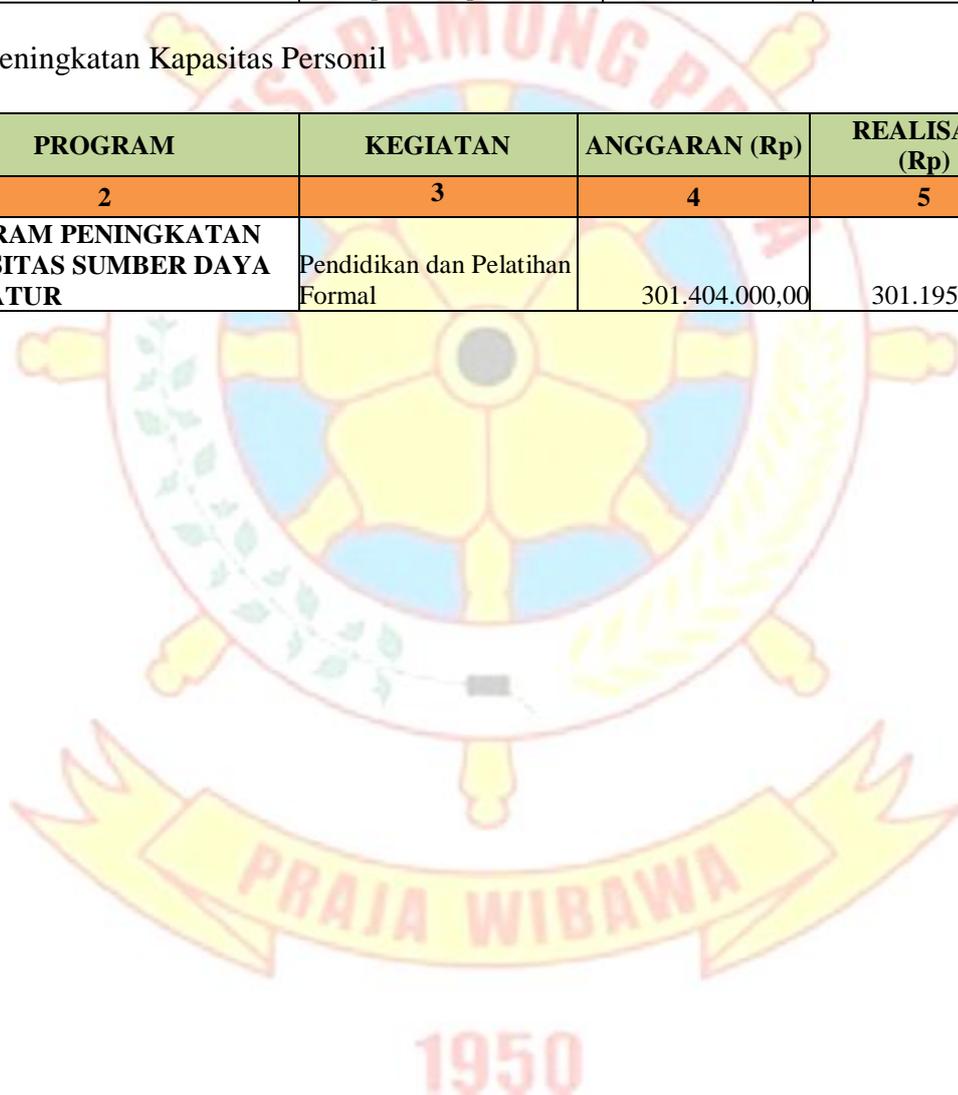
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	19.500.000,00	19.450.000,00	99,74
2	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	27.900.000,00	26.500.000,00	94,98
		Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran	38.030.000,00	38.030.000,00	100,00
		Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	170.230.000,00	168.918.000,00	99,23
		Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	200.000.000,00	0,00	0,00
		Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	172.350.000,00	172.341.000,00	99,99



1	2	3	4	5	6
3	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	147.000.000,00	144.750.000,00	98,47
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	81.100.000,00	81.100.000,00	100,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	175.805.000,00	0,00	0,00

d. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan Pelatihan Formal	301.404.000,00	301.195.502,00	99,93





BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. TUGAS PEMBANTUAN

Untuk Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan tugas pembantuan

B. KERJASAMA DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan kerjasama daerah

C. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga

D. KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

a. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Materi Koordinasi

Adapun materi dari forum Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah mengatasi permasalahan lalu lintas

2. Instansi Vertikal yang terlibat

Instansi vertikal yang terlibat adalah SATLANTAS

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

NIHIL

4. Jumlah Koordinasi

Koordinasi dalam forum ini hanya dilakukan satu kali pada tahun 2017.

5. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat dari koordinasi forum lalu lintas angkutan jalan tersebut adalah meningkatkan sinergisitas dan kerjasama dalam pengawasan tertib lalu lintas.

6. Tindak Lanjut

adalah pelaksanaan razia lalu lintas gabungan lintas sektoral antara Satuan Lalu Lintas Polres Kab.Kapuas Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan

7. Permasalahan dan Solusi



Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi adalah belum terbangunnya fungsi koordinasi pada masing-masing sektor sehingga pelaksanaan koordinasi sulit dilakukan.

Solusi dalam meningkatkan fungsi koordinasi adalah penyusunan jadwal bersama dalam pembahasan pelaksanaan kegiatan koordinasi antar sektoral.

8. Hal Lain yang perlu dilaporkan

b. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Materi Koordinasi

Adapun materi dari koordinasi kerukunan antar beragama adalah agar tidak ada perpecahan kerukunan umat beragama

2. Instansi Vertikal yang terlibat

Instansi vertikal yang terlibat adalah POLRES, KODIM, BATALYON, dan Kementerian Agama

9. Sumber dan Jumlah Anggaran

NIHIL

10. Jumlah Koordinasi

Koordinasi dalam forum ini hanya dilakukan satu kali pada tahun 2017.

11. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat dari koordinasi forum kerukunan umat beragama tersebut adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dan terciptanya rasa kebersamaan.

12. Tindak Lanjut Koordinasi

Pendekatan kepada para tokoh agama yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu

13. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi adalah belum terbangunnya fungsi koordinasi pada masing-masing sektor sehingga pelaksanaan koordinasi sulit dilakukan.

Solusi dalam meningkatkan fungsi koordinasi adalah penyusunan jadwal bersama dalam pembahasan pelaksanaan kegiatan koordinasi antar sektoral

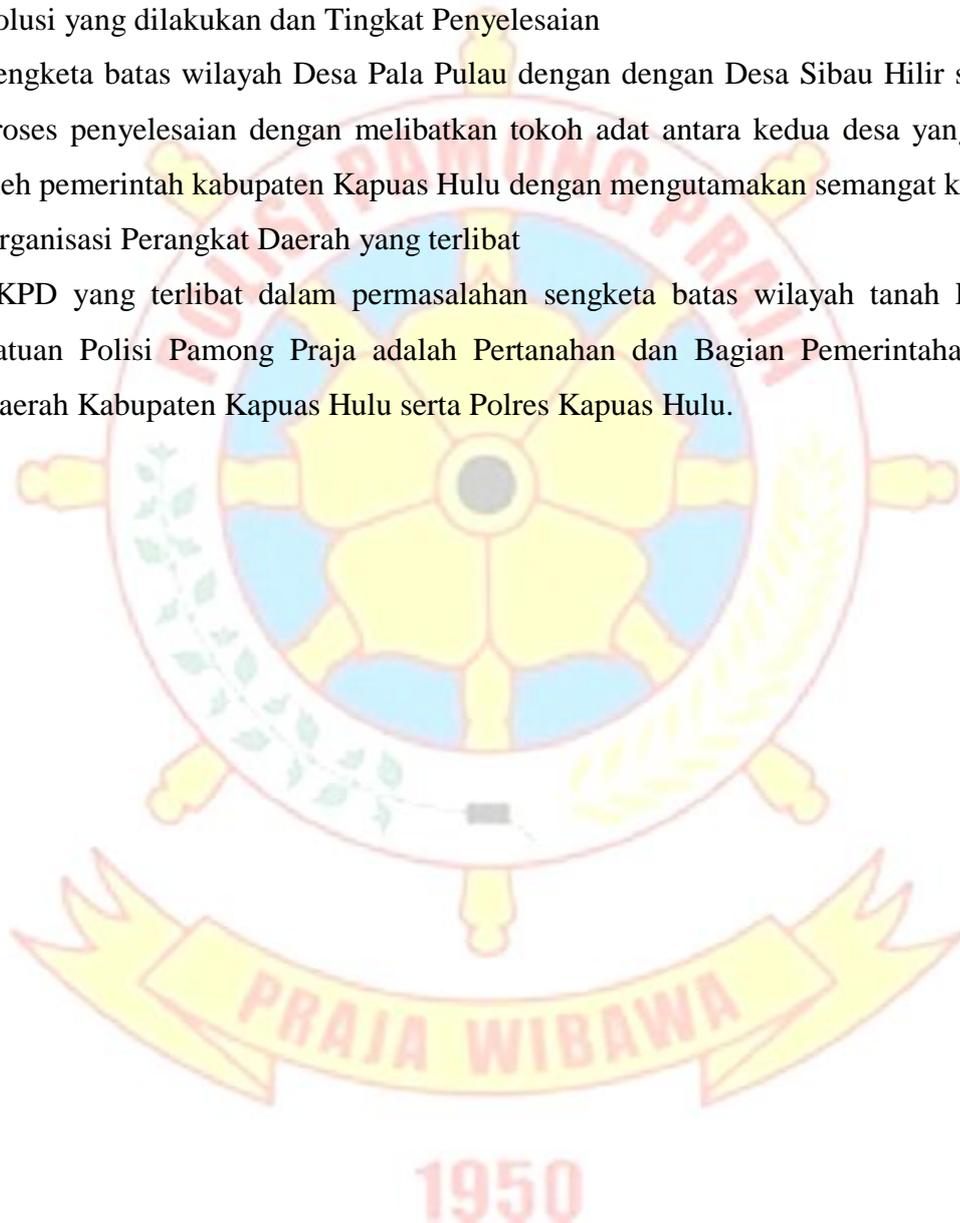
14. Hal Lain yang perlu dilaporkan



E. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Sengketa yang terjadi pada Tahun 2017 yaitu sengketa Tanah Pemerintah Daerah yang berada di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara

- a. Sengketa Batas Wilayah Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian
Sengketa batas wilayah Desa Pala Pulau dengan dengan Desa Sibau Hilir sedang dalam proses penyelesaian dengan melibatkan tokoh adat antara kedua desa yang di fasilitasi oleh pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dengan mengutamakan semangat kebersamaan.
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat
SKPD yang terlibat dalam permasalahan sengketa batas wilayah tanah Pemda selain Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pertanahan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta Polres Kapuas Hulu.





BAB V PENUTUP

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

1. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sehingga terhambat pelaksanaan Penegakan Perda disebabkan terbatasnya pendidikan aparatur Polisi Pamong Praja yang hanya tamatan SMA.
2. Terbatasnya jumlah personil lapangan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pelaksanaan urusan-urusan kurang optimal;
3. Terbatasnya anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menghambat proses koordinasi yang berkenaan dengan pelanggaran trantibum serta pelaporan kejadiannya.
4. Belum terbentuknya UPT Polisi Pamong Praja di kecamatan-kecamatan.
5. Terbatasnya jumlah anggaran operasional sehingga tidak mampu menjangkau semua wilayah yang menjadi kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Kurangnya koordinasi dari dinas/instansi terkait yang melaksanakan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sehingga permasalahan dalam pelaksanaan maupun pelanggaran tidak terdata secara menyeluruh;
7. Peraturan Daerah yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, Ekonomi dan budaya masyarakat;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional sehingga pelaksanaan pengawasan ditempat-tempat yang rawan gangguan trantibmas tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

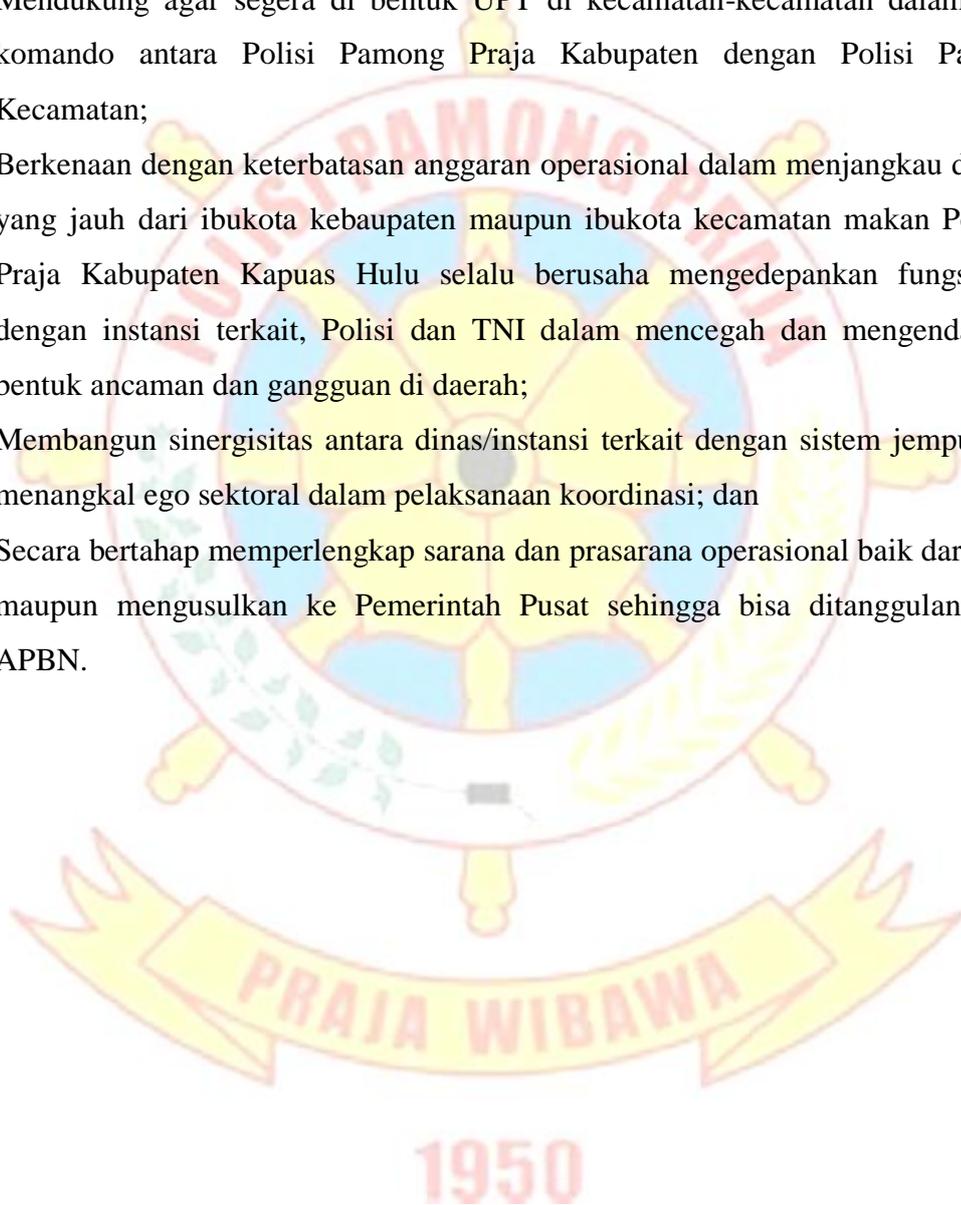
B. SOLUSI

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan konsolidasi dengan PPNS yang ada di Dinas/instansi terkait di lingkaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;



2. Optimalisasi sumber daya personil yang ada khususnya pengawasan pada daerah-daerah rawan trantibmas;
3. Untuk menanggulangi kurangnya personil Sat Pol PP dikecamatan adalah bekerjasama dengan masing-masing Polsek dan Danramil untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah kecamatan;
4. Mendukung agar segera di bentuk UPT di kecamatan-kecamatan dalam upaya garis komando antara Polisi Pamong Praja Kabupaten dengan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Berkenaan dengan keterbatasan anggaran operasional dalam menjangkau daerah-daerah yang jauh dari ibukota kebaupaten maupun ibukota kecamatan makan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selalu berusaha mengedepankan fungsi koordinasi dengan instansi terkait, Polisi dan TNI dalam mencegah dan mengendalikan segala bentuk ancaman dan gangguan di daerah;
6. Membangun sinergisitas antara dinas/instansi terkait dengan sistem jemput bola untuk menangkal ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi; dan
7. Secara bertahap memperlengkap sarana dan prasarana operasional baik dari dana APBD maupun mengusulkan ke Pemerintah Pusat sehingga bisa ditanggulangi dari dana APBN.







PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2017

NO	FORUM	MATERI	JML KOORDINASI	INSTANSI VERTIKAL	SKPD YANG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	HASIL & MANFAAT
					NAMA SKPD	JML PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Mengatasi Permasalahan Lalu Lintas	1x	SATLANTAS	SATPOL PP, DISHUB, Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya	1 Org	S2	IV/a	-	0,00	1. Meningkatnya sinergisitas dan kerjasama dalam pengawasan tertib lalu lintas
2	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	Agar tidak ada perpecahan kerukunan umat beragama	1x	POLRES, KODIM, BATALYON, dan Kementerian Agama	SATPOL PP	1 Org	S2	IV/a	-	0,00	2. meningkatnya kerukunan umat beragama dan terciptanya rasa kebersamaan

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PEMBINAAN BATAS-BATAS WILAYAH TAHUN 2017

NO	SENGKETA BATAS WILAYAH	WILAYAH			SKPD YG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN
		DESA	KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA SKPD	JML PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOLONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Pemda	Pala Pulau	-	Putussibau Utara	- Satpol PP - Pertanahan - Bagian Pemerintahan	70 Org	S1 dan SMA	III/a, II/a, II/b, dan II/c	-	0,00

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2017

NO	JENIS BENCANA	PENANGGULANGANNYA	STATUS BENCANA	POTENSI BENCANA	SKPD YANG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	KELEMBAGAAN YG DIBENTUK	ANTISIPASI
					NAMA SKPD	JLH PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOL.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banjir	1. Penyelamatan dan evakuasi 2. Pendataan korban, kerusakan rumah, sawah Pemberian bantuan kebutuhan pokok 3.	Lokal	banjir	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	1	S2	IVb	DSP / APBD	-	1. Pemetaan daerah rawan bencana banjir
						2	S2	IVa			
						1	S2	IIIId			
						2	S2	IIIc			
2	Tanah Longsor	1. Penyelamatan dan evakuasi Pendataan 2. korban, kerusakan rumah, sawah Pemberian bantuan kebutuhan pokok 3.				1	S1	IVb		-	2. Pemasangan sistem peringatan dini bencana (EWS) 3. Pelatihan personil
						1	S1	IIIId			
						6	SMA	IIIId			
						1	S1	IIIc			
						3	S1	IIIa			
						1	D1	IIIb			
						5	SMA	IIIB			
2	SMA	IIIA									



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017

3	Kebakaran	1. Pemadaman Api 2. Penyelamatan dan evakuasi 3. Pendataan korban dan perhitungan kerugian 4. Pemberian bantuan kebutuhan pokok				5	SMA	IId			
						20	SMA	II c			
						16	SMA	II b			
						1	SMA	II a			
						1	SMP	II d			
						1	SMP	II c			
						5	S1	Honoror			
						1	DIII	Honoror			
						32	SMA	Honoror			

1. Pemetaan daerah rawan bencana kebakaran
2. Penyuluhan pengenalan potensi bencana kebakaran dan pencegahan dini bencana kebakaran
3. Kesiapsiagaan
4. Pelatihan personil



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

4	Korban tenggelam	1. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi							-	1. Kesiapsiagaan 2. Pelatihan personil
5	Angin puting	1. Penyelamatan dan evakuasi 2. Pendataan korban dan kerugian 3. Pemberian bantuan							-	1. Kesiapsiagaan 2. Pelatihan personil

Putussibau, 20 Februari 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2017

NO	JENIS GANGGUAN	CARA PENANGANAN	KENDALA	KOORDINASI DGN INSTANSI	SKPD YANG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	HASILNYA
					NAMA SKPD	JLM PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOL.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Melaksanakan Patroli Setiap Hari dan menegur secara persuasif	Tanah yang disewa oleh Pedagang Kaki Lima bukan milik Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Polsek Kota	SATPOL PP	70 Org	S1, D3, dan SMA	III/d, III/c, III/a, II/c, II/a dan II/b	-	0,00	1. Berkurangnya PKL yg berjualan di tempat temoatn yang dilarang
2	Pelanggaran PERDA Trantibum	Melaksanakan Razia Gabungan	Tidak adanya PPNS untuk menindaklanjuti operasi yustisi	POM TNI AD, KODIM, POLRES, DUKCAPIL DAN IMIGRASI	SATPOL PP	45 Org	S2, S1, D3, dan SMA	IV/a, III/d, III/c, III/b, III/a, II/c, II/a, dan II/b	APBDP	93.504.000	1. Menurunnnya tingkat gangguan trantibum. 2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat.
3	Pelanggaran PERDA Kawasan Tanpa Rokok	Melaksanakan pengawasan secara berkala	Nihil	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan	SATPOL PP	12 Org	S1 dan SMA	III/d, II/c dan II/b	-	0,00	1. Berkurangnya kesadaran para perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

											2 Bertambahnya kawasan tanpa rokok khususnya perkantoran, rumah sakit, puskesmas dan sekolah-sekolah yang ada di putussibau dan kedamin
4	Pelanggaran PERDA Izin Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Mengontrol Surat Izin Praktek Dokter dan APOTIK- Memonitor Penanganan Peredaran Obat PCC	Nihil	Dinas Kesehatan dan POLRES	SATPOL PP	2 Org	SMA	II/b	-	0,00	<ul style="list-style-type: none">1 Praktek Dokter dan Apotik memiliki izin praktek dan surat izin apotik (SIA).2 tidak ditemukan peredaran obat-obatan yang dilarang untuk diperjualbelikan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

5	Penambangan Emas Tanpa Izin	Melaksanakan Razia Gabungan secara Preventif	Masyarakat sudah mengetahui bahwa akan adanya Operasi PETI sehingga masyarakat menyembunyikan mesin dan menenggelamkan perahu / sampan	POLDA, POLRES, POLSEK dan KODIM	SATPOL PP	18 Org	S1 dan SMA	III/b, II/b dan II/c	-	0,00	1 Menurunnya aktivitas PETI khususnya dikawasan DAS Sungai Kapuas
---	-----------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------	--------	------------	----------------------	---	------	-------------------------------------------------------------------

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001

1950



**JUMLAH DAN SUMBER ANGGARAN PENCEGAHAN/ PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2017**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	608.510.000	DAU
1.1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	27.900.000	DAU
1.2	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran	38.030.000	DAU
1.3	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	170.230.000	DAU
1.4	Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	200.000.000	DAU
1.5	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	172.350.000	DAU
2	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	228.100.000	DAU
2.1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	147.000.000	DAU
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	81.100.000	DAU
3	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA	175.805.000	DAU
3.1	Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	175.805.000	DAU
TOTAL		1.012.415.000	-

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN KAPUAS HULU

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data	Capaian	Keterangan
						(Tahun 2017)	KInerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada PERDA	PERDA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Tidak	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ----- Unit.		
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada PERDA RTRW		tidak	
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan KTP	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	PERDA Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan	tidak ada	
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	PERDA Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan	Tidak dipungut biaya	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2017 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017, sebanyak 70 orang - Penduduk pada akhir tahun 2017, berjumlah 237.599 orang	$\frac{120}{237.599} \times 100\% = 0,05\%$	
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	PERDA Nomor 09 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	Ada	



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017*

		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	PERDA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Ada	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal ----- 2014 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2014.	Tepat / tidak	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada tanggal ----- 2014 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2014 - Laporan Kinerja tahun 2016. disampaikan pada tanggal ----- 2014 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2014	Tepat/tidak Tepat/tidak	
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan ----- 2) Urusan ----- 3) Urusan ----- 4) Urusan ----- 5) Urusan ----- 6) Urusan ----- Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2016, sebanyak 6 urusan. 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan Sosial 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan 6. Urusan BKKBN



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2012	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst--- MOU	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	<u>Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional</u>	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ---- -- program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas-	-	Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = ----- urusan.	-	Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2012. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017*

Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2012	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2012	<p>Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2016. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2016).</p>	Tepat/Tidak tepat	Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2012.
	16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	<p>Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)</p>	Ada/tidak	
	17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	<p>Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----- 4) Urusan PU Rp. ----- 5) Urusan Sosial Rp. ----- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----- 7) Urusan Koperasi Rp. ----- 8) Urusan Satpol PP Rp. ----- 9) <u>Urusan Kependudukan & Capil Rp. -----</u> <p>Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. -----</p>	-	
18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	<p>Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> <p>Total Belanja Pend & Kes Rp. -----</p>	-		



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

		Pelayanan Publik	19	<u>Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan peraturan-perundang-undangan</u>	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor ----- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik?)	Ada/tidak	
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak ----- orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak ----- orang.	-	
			21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	
		Kelembagaan	22	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ----- unit 2) Dinas = ----- unit 3) Badan = ----- unit 4) Kantor = ----- unit 5) Rumah Sakit = ----- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ----- unit 7) Kecamatan/Distrik = ----- unit Jumlah SKPD = ----- unit	----- unit	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, sebanyak ----- - Perda (Daftar terlampir)	... PERDA	lampirkan daftar PERDA yang ditetapkan
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2016	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak ----- PERDA.	-	



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017*

5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016 x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak----- keputusan. 		lampirkan daftar keputusan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016 x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. 		Lampirkan daftar Keputusan Bupati
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2012 x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak ----- Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Perbup. 		Lampirkan daftar Peraturan Bupati
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	<p>Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perda Nomor ----- Tahun 2012 tentang ----- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2012 tentang ----- 3) Dst. <p>Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak -----</p>		
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	<p>Apabila ADA,</p> <p>Sebutkan dasar hukumnya.</p> <p>PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- - tentang ----- (konsultasi publik)</p>	Ada/tidak	



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017*

	N DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi penda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi penda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun - -----tentang -----.	Ada/tidak	
9	TRANSPARAN SI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. ----- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. -----	-	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2016, sebesar Rp. -----	-	
		Alokasi Belanja pada APBD	33	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp----- - Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar Rp. -----	-	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. ---	-	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: -----	Opini tahun 2016 = -----	Opini,; 1) WTP/ unqualified opinion);



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

	N TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD				terakhir		Opini tahun 2012 = -----	2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2012, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2016, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. -----	-	
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. -----	-	Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak ----- temuan.	-	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	<u>Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD</u>	Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2016 APBD	-	Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2016- PAD	- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar	-	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

					2016) : PAD 2016 X 100%	Rp.----		
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGG RAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- yang terdiri dari 1) ----- 2) ----- 3) ----- 4) Dst ---- ---- Penghargaan	Lampirkan daftar penghargaan yang diterima kabupaten
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2016	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak ----- ijin	... ijin	Lampirkan Daftar ijin investasi

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA KUNCI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2017
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
KABUPATEN
SKPD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN

: KAPUAS HULU
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
						URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (Yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Rasio Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Tidak Ada	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 SOP Sat Pol PP 1. SOP Patroli dan Pengawasan 2. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan Satpol PP 3. SOP Peningkatan Kemampuan Aparatur Anggota Sat Pol PP 4. 30. SOP Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran 5. SOP Pelaksanaan Pengawasan VIP dan Pengamanan	Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017

						6. SOP Penegakan Peraturan Daerah		
						7. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		
						8. SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
						9. SOP Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/ Orang-Orang Penting		
						10. SOP Pelaksanaan Tempat-Tempat Penting		
						11. SOP Pelaksanaan Operasional Patroli		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Rasio Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 6	$\frac{6,00}{6,00} \times 100\% = 100\%$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 35	$\frac{35,00}{40,00} \times 100\% = 88\%$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	jabatan fungsional, yaitu : 1. Pol PP Ahli 2. Pol PP Terampil	Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 120 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 5.259 personil 	$\frac{120,00}{5.259,00} \times 100\% = 2,28\%$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 35 org. 	$\frac{0,00}{35,00} \times 100\% = 0\%$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 35 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 35 orang. 	$\frac{35,00}{35,00} \times 100\% = 100\%$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			10	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam RENJA 	$\frac{5,00}{5,00} \times 100\% = 100\%$



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017

				SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	SKPD, Sebanyak 5 Program	5,00			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	$\frac{5,00}{8,00} \times 100\% =$	63%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program	$\frac{2,00}{10,00} \times 100\% =$	20%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 10.217.091.353,00	$\frac{10.217.091.353}{10.217.091.353} \times 100\% =$	0,58%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017

				- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.766.656.848.156,43	1.766.656.848.156,43		
Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp.78.900.000,00 - Total Belanja SKPD sebesar Rp. 10.798.368.000	$\frac{\text{Rp}78.900.000,00}{\text{Rp}10.798.368.000,00} \times 100\% = 0,73\%$		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 317.750.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.315.970.000,00	$\frac{\text{Rp}317.750.000,00}{\text{Rp}3.315.970.000,00} \times 100\% = 9,58\%$		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 317.750.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.798.368.000,00	$\frac{317.750.000,00}{1.766.656.848.156,43} \times 100\% = 0,02\%$		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis,	3 Jenis		SATUAN POLISI PAMONG



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017

				komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK		PRAJA	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	1. KIB 2. Buku Inventaris 3. Daftar Mutasi Barang	ADA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yg tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah) dibagi total asset yg dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 64 Asset senilai Rp. 9.082.198.918,48 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 421 Asset senilai Rp. 9.104.298.918,48	$\frac{22.100.000,00}{9.104.298.918,48} \times 100\% = 0,24\%$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Prasarana Informasi :		
				1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Mobil Patwal 6. Pengumuman di Mass Media		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Mobil Patwal 6. Pengumuman di Mass Media	Ada Sebanyak 1 Buah Ada Sebanyak 1 Buah Tidak Ada Ada Sebanyak 1 Buah Ada sebanyak 2 Unit Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	IKM	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
--	-----------------------------------------------	----	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------	----------------------------

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001





Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Kapuas Hulu

NO.	ESSELON/ NON ESSELON	PENDIDIKAN					GOLONGAN RUANG				DIKLATPIM	
		S2	S1/ D4	D3	SLTA	SD/ SLTP	I	II	III	IV	SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	III	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-
3	IV	3	8	-	6	-	-	-	16	1	16	1
	SUB JUMLAH	5	9	0	6	0	0	0	16	4	19	1
4	FUNGSIONAL	1	6	1	88	4	-	66	19	-	-	100
	TOTAL	6	15	1	94	4	0	66	35	4	19	101

Putussibau, 20 Februari 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN SKPD TAHUN 2017

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSONIL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT	JUMLAH PERSONIL	GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL
		(ORG)		(ORG)		(ORG)		(ORG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satuan Polisi Pamong Praja	120	S2	6	Pembina Tk.1	2	IV b	2
			S1	15	Pembina	2	IV a	2
			D3	1	Penata Tk.1	24	III d	24
			D2	0	Penata	9	III c	9
			D1	0	Penata Muda Tk.1	9	III b	9
			SLTA / Sederajat	94	Penata Muda	9	III a	9
			SLTP	4	Pengatur Tk.1	9	II d	9
			SD	0	Pengatur	33	II c	33
					Pengatur Muda Tk.1	19	II b	19
					Pengatur Muda	4	II a	4
					Juru	0	I c	0
TOTAL								120

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001



Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu
Tahun 2017

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil Patroli dalam Kota	1 Unit	1	-	-	
2	Mobil PATWAL	2 Unit	2	-	-	
3	Mobil DAMKAR	3 Unit	3	-	-	
4	Motor Pengawalan	2 Unit	2	-	-	
5	Speed Long Boat	1 Unit	1	-	-	
6	Tameng Anti Huru Hara	15 Unit	13	-	2	
7	Tongkat T	60 Unit	20	-	40	
8	Helm Anti Huru Hara	15 Unit	15	-	-	
9	Baju Anti Huru Hara	15 Stel	15	-	-	
10	Baju Tahan Panas	15 Stel	15	-	-	
11	Helm Tahan Panas	15 Stel	14	-	1	
12	Sepatu Tahan Panas	15 Psg	15	-	-	
13	Sarung Tangan Tahan Panas	15 Psg	15	-	-	
14	Kaca Mata Tahan Panas	15 Buah	15	-	-	
15	Masker	15 Buah	15	-	-	
16	Oksigen Portable	2 Set	2	-	-	
17	HT	15 Buah	15	-	-	
18	Selang Penyemprot Air	20 Gulung	20	-	-	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

19	Nozzle	5 Buah	5	-	-
20	Mesin Penyedot Air Portable	2 unit	2	-	-
21	Pipa Penyedot	5 Buah	5	-	-

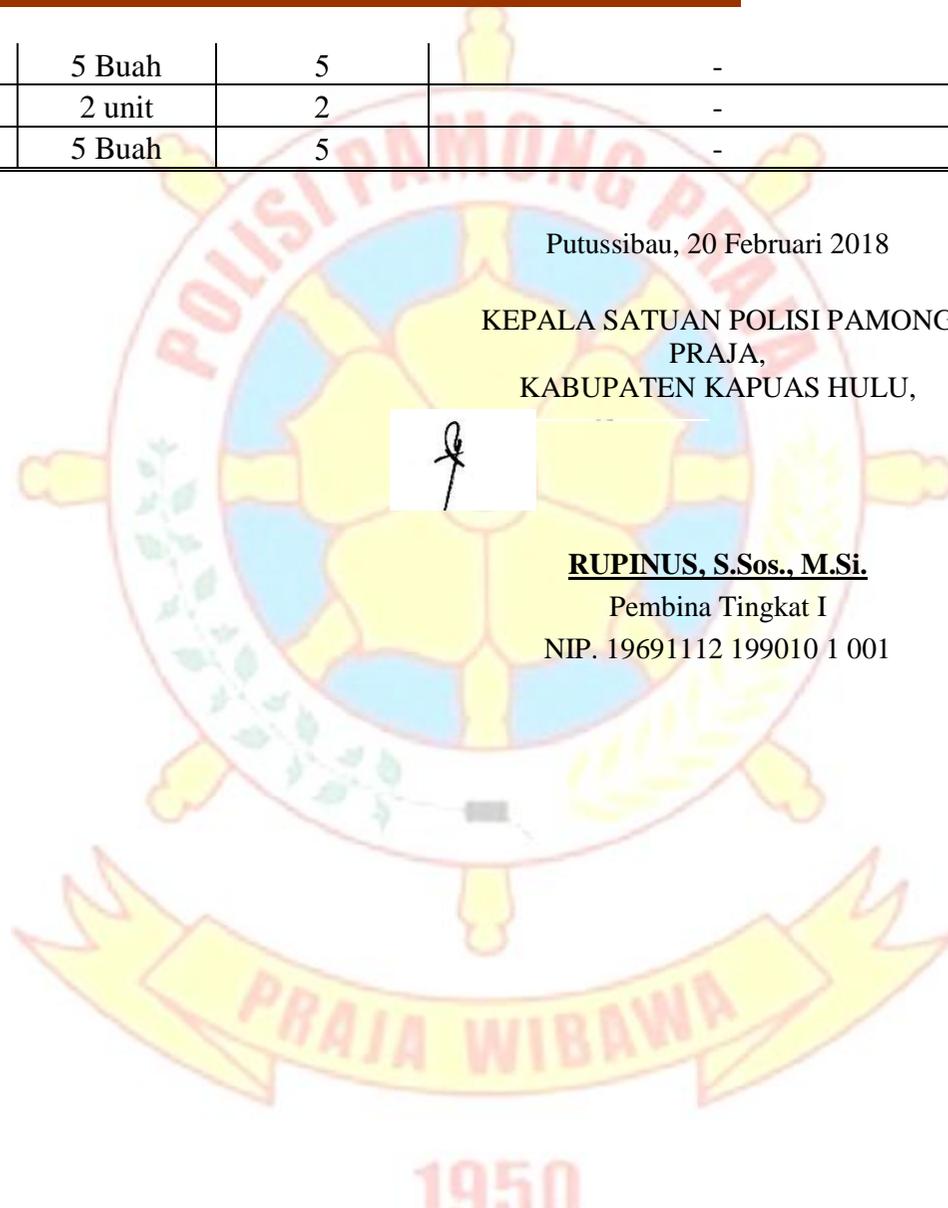
Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001





**Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2017**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya Penyediaan Jasa Publikasi
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan Pelatihan Formal



4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan
5	POGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
7	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran
	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
	Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana
	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor
8	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
9	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA
	Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001



**MATRIK CAPAIAN KEGIATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
I.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.475.000,00	5.475.000,00	100,00	
I.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.460.000,00	33.237.330,00	93,73	
I.3	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18.725.000,00	17.160.450,00	91,64	
I.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	81.880.000,00	80.520.000,00	98,34	
I.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
I.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.728.000,00	76.728.000,00	100,00	
I.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.508.000,00	22.508.000,00	100,00	
I.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00	
I.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12.000.000,00	11.760.000,00	98,00	
I.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	150.150.000,00	150.150.000,00	100,00	
I.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	436.349.000,00	436.348.719,00	100,00	
I.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	503.490.000,00	503.412.000,00	99,98	
I.13	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	200.228.000,00	200.093.509,00	99,93	
I.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya	2.649.800.000,00	2.600.170.000,00	98,13	
I.15	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000,00	5.403.000,00	72,04	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
II.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	315.750.000,00	305.652.250,00	96,80	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

	III.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	301.404.000,00	310.276.530,00	102,94	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN					
	IV.1	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.040.000,00	48.060.000,00	133,35	
	IV.2	Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan	28.444.000,00	276.065.000,00	970,56	
V	POGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL					
	V.1	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	166.900.000,00	166.900.000,00	100,00	
	V.2	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda	93.504.000,00	21.000.000,00	22,46	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
	VI.1	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	19.500.000,00	19.450.000,00	99,74	
VII	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM					
	VII.1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	27.900.000,00	26.500.000,00	94,98	
	VII.2	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran	38.030.000,00	38.030.000,00	100,00	
	VII.3	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	170.230.000,00	168.918.000,00	99,23	
	VII.4	Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	200.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan paket pekerjaan tidak bisa dilaksanakan karena keterlambatan dalam pelelangan pekerjaan (POKIR)
	VII.5	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	172.350.000,00	172.341.000,00	99,99	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN					
	VIII.1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	147.000.000,00	144.750.000,00	98,47	
	VIII.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	81.100.000,00	81.100.000,00	100,00	
IX	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA					



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

IX.1	Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	175.805.000,00	0,00	0,00	Kegiatan pembentukan Pokmas dan relawan peduli bencana tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dalam memobilisasi relawan
JUMLAH		#####	5.953.108.788,00	95,94	

Putussibau, 20 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001





Mobil Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu





Pos DAMKAR Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu



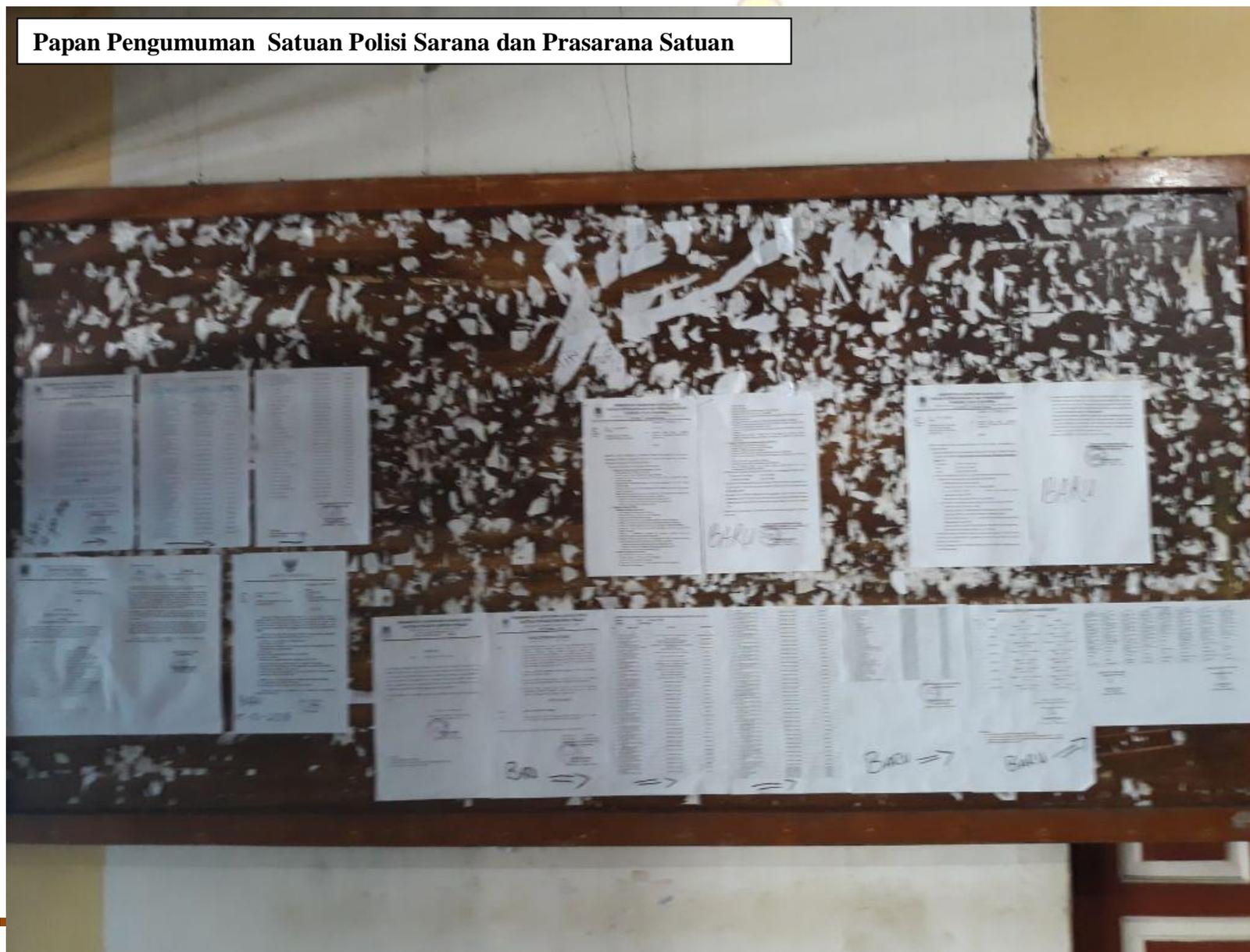


Pos Penjagaan/ Pos Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu





Papan Pengumuman Satuan Polisi Sarana dan Prasarana Satuan





HUT Pol PP dan Raker Trantibum





Pelatihan Pengendalian Masyarakat (DALMAS)





Pendataan Tempat Hiburan Malam





Peninjauan PKL





Pengamanan Porpuja



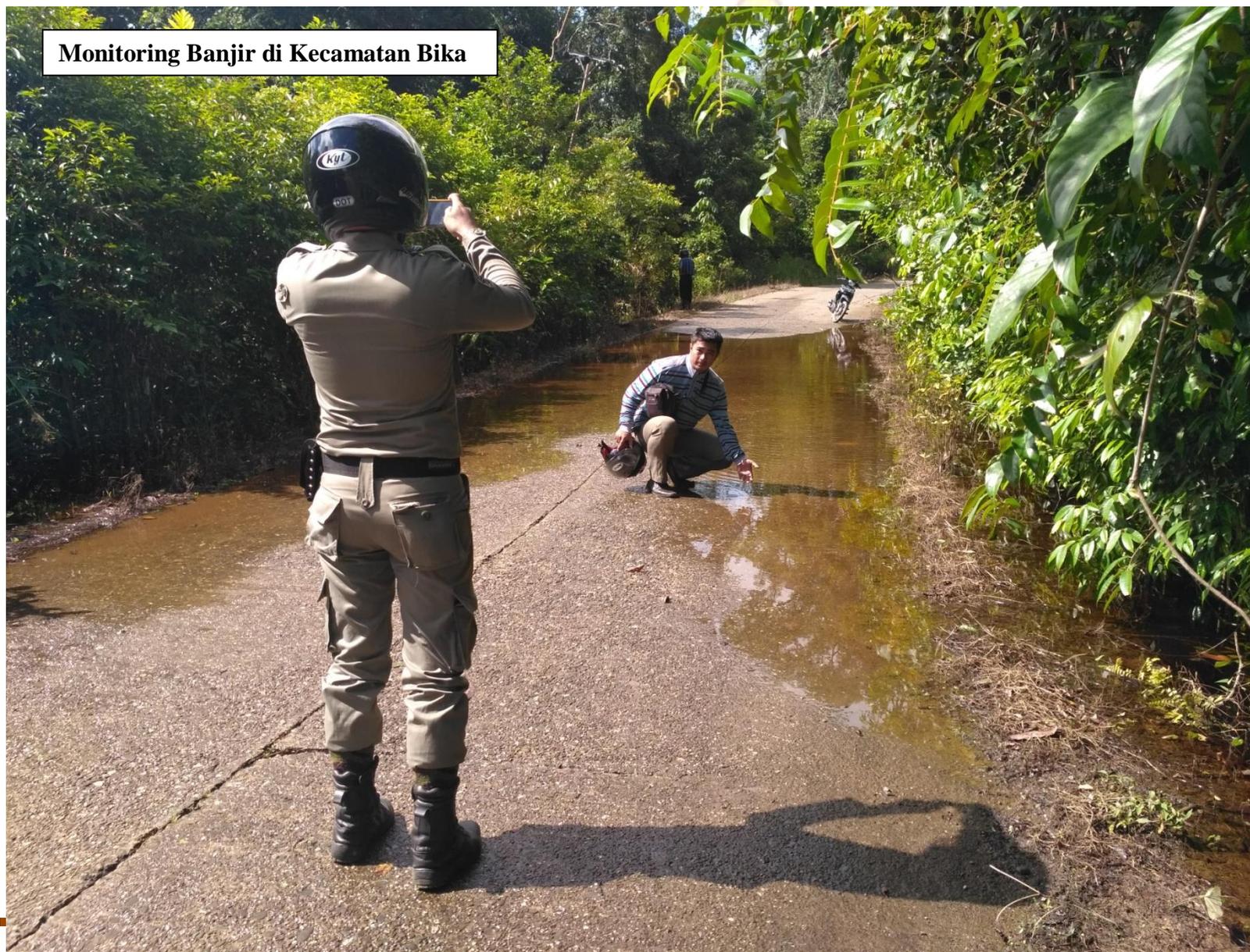


Sengketa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu





Monitoring Banjir di Kecamatan Bika





Simulasi Pengendalian Kebakaran

